

# IMPLEMENTASI STRATEGI E-GOVERNMENT KOTA PAREPARE MENGUNAKAN MODEL CASSIDY DAN DIMENSI PEMERINGKATAN *E-GOVERNMENT* INDONESIA (PeGI)

## *IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT STRATEGIES In PAREPARE CITY USING CASSIDY MODEL AND DIMENSIONS OF INDONESIA E-GOVERNMENT RANKING*

**Firdaus Masyhur**

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar  
Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah II No.25, Makassar, 90123, Telp/Fax: 0411-4460084

e-mail: firdaus.masyhur@kominfo.go.id

(Diterima: 30/8/2016, Direvisi: 17/10/2016, Disetujui terbit: 30/11/2016)

### **Abstrak**

Pengembangan *e-Government* di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003, namun perkembangannya hingga saat ini belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat serta tekanan akibat laju perkembangan teknologi yang sangat pesat. Penelitian ini merupakan upaya dalam menyusun strategi implementasi *e-Government* di Kota Parepare untuk mewujudkan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif sesuai dengan visi Kota Parepare untuk menjadi kota *cyber*. Metode yang digunakan mengkombinasikan Model Cassidy dan Dimensi PeGI. Dimensi-dimensi PeGI digunakan untuk membatasi ruang lingkup serta mengarahkan proses dan hasil penelitian sehingga menghasilkan sebuah strategi implementasi *e-Government* yang komprehensif. Program Reformasi Birokrasi juga dijadikan acuan implementasi khususnya dalam menata proses bisnis layanan publik yang ada di Kota Parepare. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi dari dimensi kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan. Strategi ini kemudian diwujudkan dalam kebijakan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Kota Parepare yang dijadikan pedoman bersama Tim Reformasi Birokrasi dan Unit Kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Kata Kunci: *e-Government*, Model Cassidy, PeGI, Reformasi Birokrasi

### **Abstract**

*The development of e-Government in Indonesia has started since 2003, but progress has not been able to answer the challenges and needs of the community as well as pressure from the pace of technological development. This study is an effort to strategize the implementation of e-Government in Parepare to realize governance with the effective use of information technology in accordance with the vision of Parepare to be a cyber city. The method used is the combination of Cassidy Model and Dimensions of PeGI. The dimensions is used to limiting the scope and direct the process and results to produce a strategy implementation of comprehensive e-Government. Bureaucratic Reform Program is also used as a reference, especially in managing the business processes of public services in the Parepare City. This study generates recommendations from the policy, institutional, applications, infrastructure, and planning dimensions. This strategy was later embodied in the policy of the Master Plan for Information and Communication Technology (RITIK) Parepare guiding along Bureaucracy Reform Team and Unit of Work in the Field of Communication and Information.*

**Keywords:** *e-Government, Cassidy Model, PeGI, Bureaucracy Reform*

## PENDAHULUAN

Era reformasi menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, cepat, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Kemampuan untuk mengikuti perubahan akan meningkat sejalan dengan teknologi yang semakin mudah diakses. Para pelaku ekonomi dan masyarakat berharap untuk mendapatkan layanan pada waktu dan tempat yang sesuai dengan keinginan mereka. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan TIK atau yang populer disebut *e-Government* (e-Govt).

e-Govt intinya adalah proses pemanfaatan TIK sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien dengan tujuan membenahi administrasi pemerintahan pada semua jajaran serta upaya percepatan Reformasi Birokrasi (Fuad & Mudjahidin, 2013). Didalamnya ada dua hal utama yaitu penggunaan TIK sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Dalam konsep e-Govt, masyarakat setiap saat dapat terhubung dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat.

e-Govt memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, serta peningkatan partisipasi warga. Dengan demikian e-Govt akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik

sebagai jalan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi khususnya dalam pelayanan publik. Melalui e-Govt, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, TIK serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Kaitan Reformasi Birokrasi dan pengembangan e-Govt sangat terlihat pada bagian penataan tatakelola (*business process*) layanan publik. Hal tersebut lebih rinci dijelaskan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 tahun 2011.

Kota Parepare menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan e-Govt sebagaimana yang dirasakan oleh banyak daerah di Indonesia. Kurangnya format kebijakan serta tidak sinerginya antara kemampuan SDM dan pembangunan infrastruktur menjadi alasan klasik terhambatnya implementasi e-Govt. perencanaan pengembangan e-Govt juga belum pernah dilakukan, hal ini berdampak pada minimnya alokasi anggaran yang mendukung pengembangan e-Govt di Parepare. Sehingga cita-cita yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadikan Parepare sebagai *Cyber City* hanya slogan belaka tanpa adanya rencana aksi yang nyata.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka diperlukan persiapan yang

matang (Jaya, 2013) serta formulasi strategi implementasi e-Govt untuk digunakan sebagai kerangka acuan penerapan TIK dalam upaya mengembangkan e-Govt di Pemerintah Kota Parepare, serta upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun ruang lingkup pengembangan dalam dokumen kebijakan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota Parepare ini terdiri dari 5 (lima) komponen pengembangan yaitu: Kebijakan, Kelembagaan, Aplikasi, Infrastruktur dan Perencanaan.

## **LANDASAN TEORI**

Terdapat definisi *e-Government* menurut beberapa sumber, *The World Bank Group*(2006), mendefinisikan *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintah. Mark Forman(2005) menjelaskan bahwa e-Govt secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan TIK untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Sedangkan Menurut Inpres No.3 Tahun 2003, pengembangan e-Govt merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien.

Pengembangan e-Govt merupakan sebuah proyek yang kompleks dan tidak murah sehingga membutuhkan perencanaan yang baik yang merujuk pada sebuah metode atau *best practice* agar tujuan dari proyek dapat tercapai. Beberapa metode yang populer digunakan oleh para peneliti, praktisi, dan mahasiswa dalam melakukan perencanaan strategis sistem informasi diantaranya SP4IS oleh Edwin D. Tozer (1996), *Strategic Planning for Information System* oleh Ward & Peppard (2007), *IS/IT Strategy Work Model* Y oleh Petter Gottchalk(2006), dan *Information System Strategic Planning* oleh Anita

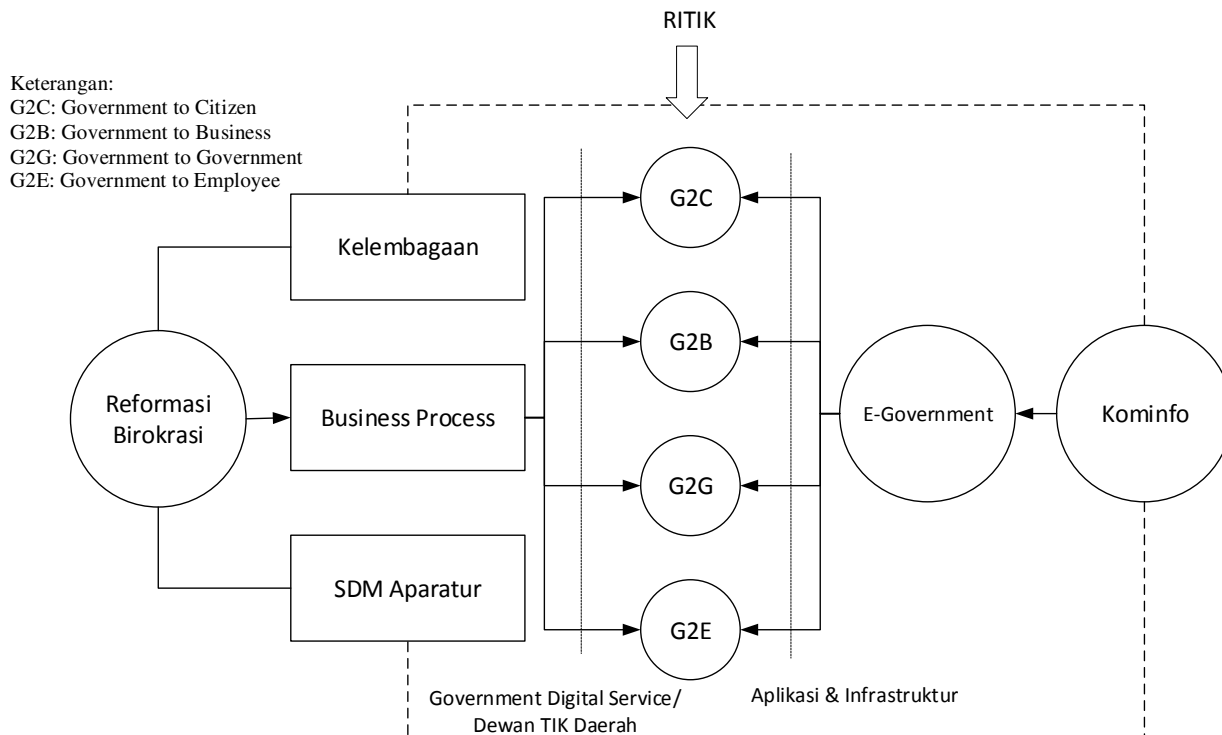
Cassidy(2005) yang digunakan pada penelitian ini.

Penelitian tentang penyusunan rencana strategis menggunakan Model *Cassidy* ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Diantaranya dilakukan oleh Masyhur yang menggunakan model tersebut untuk menyusun strategi pengembangan TIK untuk sebuah perusahaan pelayaran (Masyhur, 2012). Sulaksono dkk (2014) juga menggunakan model yang sama dalam menyusun rencana strategis pengembangan TIK pada sebuah perguruan tinggi (Begitu pula Fauzi & Kusumo(2014) menggunakan model ini pada perusahaan farmasi. Namun belum ditemukan penelitian yang menggunakan model ini dalam menyusun strategi pengembangan TIK untuk *e-Government*. Sedangkan penelitian menggunakan Dimensi Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) digunakan oleh Alusi & Senses (2014) dan Setyadi, dkk(2015) dalam menyusun rencana strategis *e-Government* sebuah lembaga pemerintah. Penelitian ini merupakan penggabungan 2 model berbeda yang dijadikan kerangka kerja dalam menyusun sebuah rencana strategis.

Menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan pengembangan e-Govt merupakan dua program kegiatan yang memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan dapat dikatakan bahwa e-Govt merupakan cita-cita yang tersirat dalam program Reformasi Birokrasi. Pada gambar 1 dijelaskan bahwa baik pengembangan e-Govt maupun program Reformasi Birokrasi sama-sama bertujuan untuk menciptakan layanan yang moderen/berbasis elektronik. Kedua inisiatif tersebut dapat efektif bila memiliki panduan kerja yang sama, dalam wujud Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK). Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Pengembangan e-Govt (misalnya Kominfo) dapat berbagi area

tugas. Penataan proses bisnis, penataan kelembagaan serta pengembangan SDM dapat menjadi area tugas Tim Reformasi Birokrasi. Sedangkan pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK menjadi area tugas SKPD Kominfo. Alternatif lain

adalah membentuk tim Dewan TIK Daerah yang berfungsi menjembatani tugas dari masing-masing tim sehingga meminimalisir potensi *overlap* kewenangan dalam pengembangan e-Govt.



**Gambar 1. Penyelarasan Program Reformasi Birokrasi dan Pengembangan e-Government**

## METODE PENELITIAN

### Model Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam pada penelitian ini mengadopsi model yang diusulkan oleh Anita Cassidy (2006) yang bersifat deskriptif kualitatif. Model tersebut telah banyak digunakan dalam perumusan rencana strategis perusahaan-perusahaan yang berskala nasional maupun internasional serta beberapa lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Model ini terdiri dari 4 fase yang menggambarkan urutan dari aktivitas dalam proses penyusunan rencana strategis. Fase pertama adalah *Visioning*, bertujuan untuk melihat visi pembangunan dan inisiatif pengembangan e-Govt yang sudah ada. Fase kedua adalah *Analysis*, bertujuan untuk memperjelas posisi e-Govt dan peranannya selama ini, juga sebagai

upaya untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dengan kondisi e-Govt sehingga muncul berbagai potensi untuk melakukan transformasi sesuai dengan tujuan organisasi. Fase ketiga adalah *Direction*, bertujuan untuk memahami visi pembangunan pemerintah daerah yang diinterpretasikan ke dalam tujuan e-Govt, sehingga pada akhirnya tujuan pemerintah dan tujuan e-Govt dapat diselaraskan. Fase keempat adalah *Recommendation*, menghasilkan detail tentang pelaksanaan pengembangan e-Govt untuk beberapa tahun ke depan.

Keempat fase pada Model Cassidy tersebut dipadukan dengan Model Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) yang menggunakan 5 (lima) dimensi yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Perencanaan. Tujuannya adalah untuk mengarahkan

proses pengumpulan data, analisis data serta rekomendasi yang dihasilkan kepada dimensi-dimensi tersebut.

### **Teknik Pengumpulan dan Sumber Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *survei* dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada penanggung jawab TIK di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sejumlah 34 di lingkup Pemerintah Kota Parepare. Sementara observasi digunakan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari proses wawancara. Pengumpulan data diakhiri dengan *Focus group discussion (FGD)* dengan 6 (enam) SKPD yang memiliki karakter pelayanan dengan mewakili dimensi e-Govt (misalnya untuk G2B diwakili oleh Dinas Perizinan) dalam memberikan layanan berbasis elektronik, yaitu Dinas Kominfo, Bappeda, Dinas Perizinan, Dinas Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Kepegawaian Daerah.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data penelitian kualitatif Model Interaktif (Milles & Huberman, 1984) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu : (a) tahap reduksi data (b) tahap penyajian data (c) tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Tahapan tersebut disesuaikan dengan fase dari model penelitian yang telah diadopsi. Hasil analisis tersebut kemudian dipetakan pada proses analisis selanjutnya yang menggunakan teknik Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT digunakan untuk mendapatkan gambaran yang terukur dari 4 sudut pandang penilaian tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap pengembangan dan pembangunan e-Govt. Analisis ini juga menjadi dasar rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar kedepan e-Govt menjadi lebih selaras dan sesuai

dengan visi misi pembangunan Kota Parepare.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian dimulai (*fase visioning*) dengan mengumpulkan fakta terkait kondisi terkini berdasarkan dimensi PeGI yaitu kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan. Kebijakan yang ada atau pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare sampai saat ini hanya mencakup aspek perencanaan secara umum, misalnya diseminasi informasi melalui media. Kebijakan pemanfaatan TIK masih bersifat sektoral dan tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Contoh kebijakan yang ada adalah instruksi penggunaan surat elektronik (*email*) di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dinas Kominfo bahkan dijadikan percontohan penerapan sistem persuratan secara elektronik sejak tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat diikuti/diimplementasikan oleh instansi lainnya.

SKPD pengelola urusan Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kota Parepare adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikepalai oleh Kepala Dinas. Kendala utama pengembangan dan pemanfaatan TIK lebih pada kurang kuantitas dan kualitas SDM bidang TIK baik di Dinas Kominfo maupun di SKPD lain. Saat ini hampir setiap aktifitas pengembangan dan pemanfaatan TIK lebih banyak dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, Kominfo lebih pada fungsi teknis jika dibutuhkan dan diseminasi informasi melalui media TV, radio dan media sosial.

Aplikasi yang digunakan di lingkup Pemerintah Kota Parepare sudah memadai dari segi sistem operasi, aplikasi perkantoran (*Microsoft Office*), antivirus dengan versi terbaru. Hal tersebut sangat mendukung kinerja aparat pemerintah dalam membuat dokumen termasuk jika terjadi pertukaran data antar

instansi. Penggunaan *website* juga efektif dalam diseminasi informasi, didukung oleh pemanfaatan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Youtube*.

SKPD di lingkup Pemerintah Kota Parepare sudah menggunakan komputer dalam operasional kegiatan administratifnya, baik berbentuk komputer desktop maupun *notebook/laptop*. Walaupun pada kenyataannya beberapa perangkat merupakan hibah dari pemerintah pusat yang diberikan bersama aplikasinya (mis, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), namun perangkat tersebut telah menjadi bagian perangkat operasional pemerintah daerah.

Kota Parepare belum memiliki perencanaan TIK yang disusun dalam satu dokumen yang komprehensif berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kominfo. Dalam dokumen perencanaan yang ada (seperti RPJMD), indikator-indikator yang digunakan dalam perencanaan tidak realistis dengan

indikator pembangunan bidang TIK, misalnya jumlah warnet, wartel, dan sebagainya. Pada aspek penganggaran, lebih didominasi pada pembelian peralatan (seperti *PC*, *Printer*, dan lainnya). Belum pada aspek pembangunan sistem informasi.

Kota Parepare sendiri bahkan beberapa kali meraih penghargaan tingkat nasional terkait pemanfaatan TIK. Diantaranya 4) Penghargaan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2013, 5) Penghargaan Indonesia *Digital Society Award* (IDSA) Kategori *Overall Society*, 6) Penghargaan *Website Pemda Percontohan* tahun 2011, dan 11) Penghargaan *Innovative Government Award: Good Governance Through ICT*.

Berdasarkan hasil dan kondisi eksisting tersebut, dapat disimpulkan (fase *analysis*) bahwa ada beberapa poin yang dipetakan ke dalam hasil analisis SWOT (Tabel 1).

**Tabel 1. Hasil Analisis SWOT Kondisi Terkini**

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan daerah memiliki <i>e-leadership</i></li> <li>2. Program prioritas Walikota untuk menjadikan Parepare sebagai Kota <i>Cyber</i>.</li> <li>3. Adanya regulasi terkait kebijakan TIK</li> <li>4. Sudah ada SKPD Kominfo</li> <li>5. Secara umum aparatur Pemkot Parepare sudah mampu bekerja menggunakan komputer.</li> <li>6. Sudah memiliki banyak aplikasi <i>e-Government</i>, baik yang dibangun Kominfo, hibah pemerintah pusat, maupun SKPD lain.</li> <li>7. Sebagian besar SKPD sudah menyediakan akses jaringan internet sampai ke tingkat kelurahan</li> <li>8. Adanya peluang untuk membangun datacenter sendiri</li> <li>9. Pernah memperoleh beberapa penghargaan untuk pemanfaatan TIK dan pengembangan <i>e-Government</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sinergi antar SKPD untuk membangun <i>e-Government</i></li> <li>2. Belum banyak regulasi kebijakan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan <i>e-Government</i> yang menjangkau ke seluruh sistem pemerintah daerah</li> <li>3. Beberapa aplikasi yang ada belum digunakan secara optimal karena mindset penggunaan TIK belum dipahami.</li> <li>4. SDM praktisi TIK masih belum merata dan dioptimalkan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK</li> <li>5. Pengembangan aplikasi dan pengelolaan data masih belum terintegrasi</li> <li>6. Belum memiliki perangkat untuk memastikan ketersediaan akan kebutuhan akses jaringan yang sudah terpasang</li> <li>7. Belum memiliki datacenter/data recovery center serta sistem pengamanan informasi yang memadai</li> <li>8. Website yang ada belum terintegrasi dengan aplikasi <i>e-Government</i> lainnya terutama terkait G2G.</li> </ol>

Peluang	Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan e-Government merupakan bagian penting dari program Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik</li> <li>3. Peningkatan efisiensi kerja sebagai dampak positif implementasi e-Government sehingga dana yang terpangkas dapat dialihkan untuk pendanaan program lainnya.</li> <li>4. Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional</li> <li>5. Peningkatan kesejahteraan aparat apabila kinerjanya baik yang ditandai dengan indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> <li>6. Peningkatan peran e-Government dalam pembangunan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahamkan kepada seluruh stakeholder, pimpinan daerah serta pegawai tentang peran strategis e-Government yang sejalan dengan pembangunan daerah</li> <li>2. Banyaknya kasus kegiatan pengembangan TIK yang tidak sejalan dengan tujuan e-Government</li> <li>3. Kondisi alam (topografi dan cuaca) yang sulit dipasang perangkat transmisi data</li> <li>4. Perkembangan TI yang sangat cepat serta dinamika politik dan kemasyarakatan yang harus terakomodasi dalam perencanaan sistem</li> </ol>

Tahapan selanjutnya memasuki tahapan ketiga, *Visioning*. Berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan dari SWOT dan penyusunan strategi e-Govt, visi yang paling sesuai dengan pembangunan e-Govt Kota Parepare adalah ***Mewujudkan e-Government yang berkesinambungan menuju Kota Pare-pare sebagai Cyber City yang berdaya saing***. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi yaitu [1] Memperkuat tatakelola e-Govt, [2] Mengembangkan kemampuan SDM aparatur sesuai kompetensi dan bidang tugasnya dengan menjadikan TIK sebagai pendukung utama. [3] Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat. [4] Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan Kota Parepare. [5] Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Visi misi tersebut kemudian dijabarkan dengan menyusun matriks dengan komponen Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator. Pada misi pertama, yaitu memperkuat tatakelola e-Govt, tujuan yang ingin dicapai adalah terimplementasikannya e-Govt menuju *good governance* dengan cara melengkapi regulasi sinergi

implementasi e-Govt terintegrasi dengan indikator jumlah regulasi dan SOP, serta persentase SKPD yang memanfaatkan TIK. Kemudian optimasi pengorganisasian TIK Pemerintah dengan sasaran meningkatnya pengelolaan TIK yang indikatornya adalah persentasi perubahan pengembangan kelembagaan TIK. Kemudian membangun jaringan komputer baik intranet maupun internet dengan indikator jumlah jaringan yang terbangun. Selanjutnya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK. Sasarannya adalah meningkatnya SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK dengan indikator jumlah dan sebaran optimal SDM serta pengembangan dan pengelolaan TIK di semua SKPD.

Misi kedua terfokus pada pengembangan kemampuan SDM aparatur sesuai kompetensi dan bidang tugasnya dengan menjadikan TIK sebagai pendukung utama. Tujuan misi ini yaitu meningkatkan kemampuan SDM dalam memanfaatkan TIK di lingkungan kerjanya, dengan sasaran setiap aparatur menjadikan TIK sebagai bagian penting dalam melaksanakan tupoksi dengan

indikator literasi TIK aparatur. Tujuan selanjutnya adalah mendorong setiap aparat untuk mengembangkan budaya kerja berbasis TIK, sasarannya adalah optimalisasi pemanfaatan TIK dengan mendorong aparatur bekerja berbasis TIK dengan indikator tumbunya budaya pertukaran informasi berbasis elektronik.

Pada misi ketiga, yaitu mengembangkan infrastruktur TIK untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat, tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan internet/intranet. Sasarannya adalah meningkatnya kecepatan internet/intranet di pemerintahan dan akses publik dengan indikator Kecepatan *download/upload* internet dan intranet dan jumlah *downtime* per tahun. Tujuan lain misi ini adalah meningkatnya pemanfaatan internet/intranet untuk pemerintahan, meningkatkan keamanan informasi, serta meningkatkan fasilitasi pemanfaatan internet di masyarakat.

Misi keempat adalah Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan. Tujuannya adalah meningkatkan pemanfaatan sistem informasi/aplikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Sasarannya adalah meningkatnya pemanfaatan aplikasi serta meningkatnya jumlah layanan pemerintah berbasis elektronik dengan indikator jenis birokrasi/layanan pemerintah yang menggunakan aplikasi/sistem informasi. Tujuan lain misi ini adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data elektronik pemerintah yang terintegrasi, serta meningkatkan pemanfaatan sistem informasi bagi usaha kecil dan menengah yang terintegrasi dengan layanan pemerintahan.

Misi terakhir adalah meningkatkan keterbukaan informasi publik yang menggunakan media internet yang bertujuan meningkatkan penyediaan dan

penyebaran informasi pembangunan. Sasarannya adalah meningkatnya frekuensi masyarakat yang mengakses informasi pembangunan, dengan indikator Jumlah permohonan data/informasi kepada pemerintah daerah. Tujuan lainnya adalah meningkatkan pemantauan pemanfaatan TIK di masyarakat/dunia usaha, serta Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Misi selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan e-Govt. Susunannya dikelompokkan berdasarkan dimensi Kebijakan, Kelembagaan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Perencanaan. Pada dimensi kebijakan [1] pengembangan e-Govt dijadikan bagian penting dari program Reformasi Birokrasi serta mempercepat penyusunan kelengkapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-Govt/TIK Pemerintah Kota Parepare. Selanjutnya [2] mempercepat penerapan pengembangan e-Govt dalam birokrasi dengan mendorong perubahan proses birokrasi dan budaya kerja berbasis elektronik, [3] membangun dan memperkuat standardisasi pendelegasian tugas dan kewenangan pengembangan TIK kepada seluruh SKPD sebagai salah satu upaya menuju efektifitas dan efisiensi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Pemerintah Kota Parepare, dan [4] melakukan sosialisasi, kontrol dan monitoring atas kebijakan strategis yang sah untuk diimplementasikan, untuk memastikan bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik di seluruh SKPD.

Pada dimensi kelembagaan, [1] akan dibentuk organisasi fungsional *Chief Information Officer (CIO)*/Dewan TIK Daerah dipimpin oleh walikota atau minimal kepala SKPD eselon 2 yang kompeten untuk membuat kebijakan TIK, [2] memperkuat peran lembaga pengelola Kominfo yang secara khusus dan mandiri dalam pengelolaan e-Govt untuk



memudahkan koordinasi dengan SKPD lainnya dalam pengelolaan TIK, [3] peningkatan kapabilitas SDM di bidang TIK baik SKPD yang menangani kominfo maupun SKPD lainnya, [4] pengadaan dan pendistribusian SDM terkait TIK dikoordinasikan dengan SKPD terkait Kominfo : jumlah, kualifikasi, pendidikan [5] kebijakan legalitas pengelola TIK di SKPD, [6] Perlunya pendampingan untuk pengembangan pengelolaan TIK, dan [7] pembentukan fungsi *Helpdesk* dan monitoring jaringan SKPD baik jaringan eksternal maupun internal dilakukan secara cepat.

Selanjutnya berdasarkan dimensi infrastruktur akan dilakukan [1] percepatan dan perluasan penyediaan jaringan internet untuk menjangkau seluruh SKPD dan jaringan distribusi layanan masyarakat sampai dengan tingkat kelurahan/puskesmas/sekolah serta sarana akses internet gratis untuk masyarakat umum, [2] percepatan pengembangan dan pengelolaan *Data center* dan *Data recovery* yang baik untuk menjamin *availability* dan peningkatan keamanan informasi, [3] pemanfaatan intranet untuk komunikasi antar SKPD, [4] adanya kebijakan standar pengelolaan infrastruktur TIK di SKPD, dan [5] adanya kebijakan manajemen *bandwidth*, *Public Internet Protocol* (IP) dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh SKPD.

Pada dimensi aplikasi akan dilakukan [1] pengembangan kepemilikan, pemanfaatan data/informasi dan aplikasi e-Govt yang terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas, [2] untuk pengelolaan aset data dan informasi di Pemkot Parepare, maka perlu kebijakan sentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data di SKPD pada *datacenter* Kominfo, [3] setiap SKPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B) maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap, [4] perlunya standardisasi

metadata untuk pengembangan aplikasi dan pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas, dan [5] kebijakan *Open Source Software* digunakan untuk pengembangan aplikasi dan *Operating system*, sedangkan untuk *client/desktop* menggunakan *software* legal.

Kemudian pada dimensi perencanaan akan dilakukan [1] Penetapan Rencana Pengembangan e-Govt digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait pengembangan TIK, [2] penyusunan dokumen *action plan* untuk setiap kegiatan TIK yang berdampak luas terhadap kinerja SKPD, [3] segera disusun *Business Continuity Plan* untuk layanan infrastruktur TIK, [4] diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government kepada level eksekutif, dan [5] adanya rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD dari SKPD Kominfo.

#### *Rekomendasi Kebijakan*

Tahapan terakhir dari perencanaan adalah menyusun rekomendasi yang menjadi referensi pemerintah daerah dalam menentukan kegiatan dan anggaran. Rekomendasi disusun dan dikelompokkan berdasarkan dimensi-dimensi yang berada pada ruang lingkup penelitian. Pada rekomendasi kebijakan, beberapa peraturan dianggap penting untuk direalisasikan sebagai dasar dalam pengembangan e-Govt.

**Tabel 2. Rekomendasi Kebijakan**

<b>Regulasi</b>	<b>Cakupan</b>
Perwako	Organisasi Pengelola e-Government yang berisi tentang Visi dan Misi, Bentuk Organisasi, Tupoksi, Indikator keberhasilan dan Honor
Perwako	Pengembangan dan Implementasi e-Govtt sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi

Perwako	Pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur terpadu
Perwako	Standardisasi metadata
Perwako	Pengelolaan aset informasi daerah
Perwako	Pemanfaatan software legal
Perwako	Pemanfaatan akses informasi
Perwako/SOP	Keamanan Informasi
Perwako/SOP	Pengelolaan Datacenter
Perwako/SOP	Pengelolaan Jaringan LAN dan internet

*Rekomendasi Kelembagaan*

Pada bagian ini tidak banyak yang direkomendasikan. Fokusnya hanya pada reorientasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Tupoksi baru yang direkomendasikan adalah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pemerintahan elektronik meliputi perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika; pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana e-Govt; pelaksanaan tugas bidang pengembangan

dan pengelolaan Data dan aplikasi terintegrasi e-Govt; pelaksanaan tugas bidang pengelolaan Pos dan telekomunikasi serta diseminasi informasi publik; pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Rekomendasi Aplikasi*

Sejumlah aplikasi direkomendasikan untuk dibangun selama 5 (lima) tahun ke depan (Tabel. 3). Rekomendasi tersebut berdasarkan pemetaan yang dilakukan berdasarkan potensi strategis dan fungsi masing-masing aplikasi. Beberapa aplikasi yang telah ada saat ini memerlukan perbaikan sehingga dapat mendukung kebutuhan informasi khususnya di level manajerial. Adapun aplikasi yang belum ada akan dilakukan pembangunan sistem dengan pilihan akuisisi, yaitu membeli aplikasi, membangun aplikasi, atau menyewa aplikasi dari pihak ketiga. Rekomendasi dalam memilih vendor juga diberikan terutama adalah memilih vendor yang memiliki klausa *Service Level Agreement (SLA)* yang paling baik dan rasional.

**Tabel 3. Rekomendasi Aplikasi**

Prio	Klaster	Perincian Modul	Tahun							
			<	17	18	19	20	21	>	
1	Kinerja PNS	e-mail	✓							
		Mutasi dan pengembangan karir		✓						
		Absensi dan penggajian	✓							
		Aenilaian kinerja		✓						
		Pendidikan dan latihan			✓					
2	Kinerja Pemerintahan	<b>Data Pembangunan</b>								
		Website Pemda	✓							
		e-Filling		✓						
		Perencanaan Daerah	✓							
		Pengadaan Barang Daerah	✓							
		Pengelolaan dan Monitoring Proyek			✓					
		Sistevaluasi & info hasil Pembangunan				✓				
		Sist anggaran dan perbendaharaan daerah			✓					
		Pengelolaan barang daerah					✓			
		Katalog barang daerah							✓	
3	Layanan Masyarakat	Pengelolaan pendapatan daerah			✓					
		Pengelolaan perusahaan daerah				✓				
		Pemerintahan kelurahan dan kecamatan			✓					
		<b>Kependudukan</b>								

		Pengaduan Masyarakat	✓						
		Tataruang dan lingkungan hidup				✓			
		Kesehatan		✓					
		Pendidikan		✓					
		Ketenaga kerjaan			✓				
		Sosial dan kemiskinan			✓				
		Transportasi				✓			
		Jalan jembatan dan drainase					✓		
		Komunikasi						✓	
		Sampah dan limbah						✓	
		Perumahan dan pemukiman						✓	
		Penerangan jalan umum					✓		
		Air bersih					✓		
4	Layanan Bisnis	<b>Pajak dan Retribusi</b>							
		Pendaftaran dan perijinan	✓						
		Bisnis dan Investasi		✓					
		Administrasi DPRD			✓				
		Sistem pemilu Daerah			✓				
		Katalog Hukum	✓						
		Potensi daerah	✓						
		Pertanian perikanan peternakan				✓			
		Pariwisata		✓					
		KUKM			✓				
		Industri perdagangan					✓		
		Bangunan dan gedung						✓	
<b>Jumlah Modul Terbangun Setiap tahunnya</b>			<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

## PENUTUP

### Kesimpulan

Rencana Strategis Pengembangan e-Government Kota Parepare 2017 – 2021 ini merupakan hasil kajian penting akan tetapi bukan tak mungkin disesuaikan dengan kondisi sejalan dengan perkembangan politik, kondisi sosial kemasyarakatan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Sebaiknya dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya oleh seluruh SKPD beserta Dinas Kominfo sebagai *leading sector*-nya. Apalagi didalamnya terdapat isu-isu sensitif yang beresiko munculnya resistensi dari komponen pemerintah daerah yang terkurangi kenyamanannya dan terpaksa harus berubah sejalan dengan kebijakan otomatisasi perkantoran.

Pengadaan perangkat komputer tidak serta merta menjadi solusi atas permasalahan peningkatan kinerja pemerintah, output dari pengadaan

perangkat adalah berupa alat untuk pelaksanaan implementasi e-Govt sedangkan e-Govt itu sendiri merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemahaman ini harus dimiliki oleh seluruh pengelola pemerintah sehingga beban kerja implementasi e-Govt bukan hanya oleh Dinas Kominfo akan tetapi merupakan gerakan bersama seluruh SKPD yang dipimpin langsung oleh Walikota. Kunci utama gerakan ini adalah perubahan paradigma dari kinerja berbasis manual menjadi kinerja berbasis elektronik.

Seberapapun investasi dikucurkan untuk pengadaan teknologi informasi, tapi jika tidak didukung dengan SDM yang memadai serta kebijakan TIK yang masih lemah maka semua akan sia-sia saja karena perangkat TIK pastinya memiliki umur yang terbatas. Pemeliharaan perangkat TIK tanpa ilmu yang memadai akan menambah permasalahannya dan melenceng dari tujuan e-Govt sendiri yaitu efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah kota.

Di dalam rekomendasi implementasi e-Govt telah disebutkan hasil dan cara

mencapai hasil kegiatan pengembangan. namun apabila pimpinan dan staf kurang memahaminya maka akan lebih baik jika ada kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pendampingan implementasinya untuk mengawal suksesnya implementasi percepatan pengembangan e-Govt.

Rencana Strategis ini akan jauh lebih efektif bila dijadikan acuan bersama Tim reformasi Birokrasi Pemerintah kota Parepare dan seluruh SKPD khususnya Dinas Kominfo dalam membangun dan mengembangkan e-Govt di Kota Parepare.

### **Saran**

Implementasi e-Govt tidak berhenti pada proses perencanaan. Perlu dilakukan berbagai kajian terkait proses transformasi birokrasi terutama pada sisi penataan pelayanan publik. Kajian tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam merekayasa proses pelayanan publik yang ada menjadi pelayanan berbasis elektronik berbasis sistem informasi. Kajian terhadap proses bisnis pelayanan pemerintah perlu terus dilakukan seiring dengan upaya peningkatan kemampuan SDM dalam mengadopsi berbagai teknologi yang berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Kota Parepare.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada segenap jajaran pimpinan dan staf Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar yang telah membantu menyelesaikan tulisan ini hingga selesai. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kota Parepare yang mendukung dalam pelaksanaan pengumpulan data.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Alusi, F., & Sensuse, D. I. (2014). Penyusunan Strategi E-Government Berbasis Kerangka Kerja Peningkatan e-Government Indonesia (PEGI) di

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. *Journal of Information Systems*, 10(1), 37–44.

Cassidy, A. (2005). *A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning, Second Edition*. CRC Press.

Fauzi, I., & Kusumo, D. S. (2014). Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan Metode Anita Cassidy (Studi Kasus: PT. Medika Antapani). *Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan Metode Anita Cassidy (Studi Kasus: PT. Medika Antapani)*.

Fuad, A., & Mudjahidin. (2013). Penilaian Kualitas Layanan e-Government Dengan Menggunakan Dimensi e-Govqual (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Teknik Pomits*, 1(1), 1–6.

Gottschalk, P. (2006). *E-business Strategy, Sourcing, and Governance*. Idea Group Pub. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=6ad08e1hshIC>

Jaya, S. (2013). Implementasi dan Perkembangan e-Government di Indonesia. *Jurnal Informatika Multimedia (JIM) STIMED NUSA PALAPA*, 2(1), 37–52.

Masyhur, F. (2012). Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pada Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). *Pekommas*.

Setyadi, D. H., Setiawan, N. A., & Nugroho, E. (2015). Peran Dimensi-Dimensi PeGI dalam Penyusunan Rencana Induk/Rencana Strategis Pengembangan E-Government dengan Menggunakan Kerangka Kerja Arsitektur TOGAF. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi SNATi 2015*, 190 – 196.

Sulaksono, J., Rosidi, A., & Syahdan, S. A. (2014). Perencanaan Strategis Sistem Informasi Di Universitas Nusantara PGRI Kediri. *NUSANTARA of Research*, 91–104.

Tozer, E. E. (1996). *Strategic IS/IT Planning*. Washington: Butterworth-Heinemann.

Ward, J., & Peppard, J. (2007). *Strategic Planning for Information Systems*. Wiley. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=Y-djKt6DaV8C>